



RENCANA KERJA KECAMATAN BULU TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU
TAHUN 2024**

HALAMAN VERIFIKASI

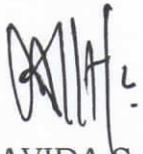
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



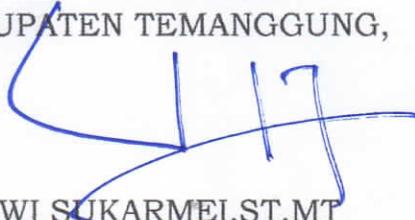
EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



SEPTIANA PUSPITA NINGRUM, S.Kom
NIP. 19960918 201903 2 004.

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Bulu dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Bulu tahun 2025. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2025.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2023.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bulu Tahun 2025.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2025 dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 26 Juni 2024



Drs. PANCA PASTPIYANTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661227 199401 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU TAHUN 2025	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
2.6. Inovasi Prangkat Daerah	38
2.7. Penghargaan	
BAB III TUJUAN, SASARAN	45
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bulu	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Bulu	45
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Triwulan Tahun 2023	11
2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Triwulan I Tahun 2024	15
2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	21
2.4. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM.....	25
2.5. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu.....	25
2.6. Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM.....	26
2.7. Persentase Jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat Kecamatan Bulu	27
2.8. Jumlah Pelyanan yang ada di Kecamatan Bulu.....	28
2.9. Persentase realisasi penerimaan PBB	28
2.10. Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa	29
2.11. Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.....	31
2.12. Penyelesaian RKP – Desa	31
2.13. Persentase Penanganan laporan kejadian	33
2.14. Data Laporan kejadian	33
2.15. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa.....	35
2.16. Data Pelanggaran Disiplin Perangkat	35
2.17. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDesa Tepat Waktu..	37
2.18. Data Penyelesaian APBDes	37
2.19. <i>Review</i> terhadap rancangan awal RKPD	40
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	46
4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan.....	50
4.2. Rencana Program dan Kegiatan.....	53

DAFTAR GAMBAR

1.1. Hubungan Hirarki Perencanaan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

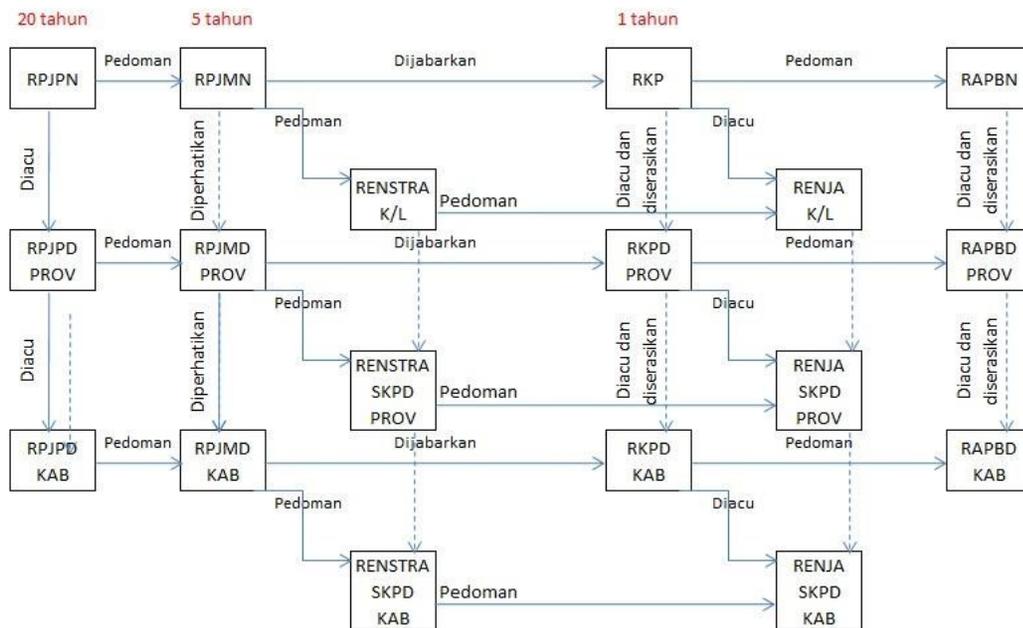
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bulu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bulu, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu;
- 2) Kondisi pelayanan Kecamatan Bulu;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu;
- 4) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bulu;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bulu;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bulu.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bulu;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bulu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bulu.

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bulu untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bulu.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun lalu berdasarkan renstra Kecamatan Bulu;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bulu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bulu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Kecamatan Bulu;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Kecamatan Bulu;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Kecamatan Bulu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bulu.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bulu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bulu;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bulu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum

di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bulu.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bulu;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bulu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bulu dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bulu untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu selama kurun waktu Tahun 2025;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bulu Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bulu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun ke-lima pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulu 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu
s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17
KECAMATAN ADMINISTRASI													
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (DAU)	%	100	5.945.969.935	100	1.833.613.546	1.715.466.677	0	1.680.442.884	0	97,96	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.339.006.120		1.646.354.546	1.529.510.597		1.503.254.707		98,28	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	56	5.339.006.120	12	1.646.354.546	1.529.510.597	12	1.503.254.707	100,00	98,28	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				146.176.568		50.918.900	52.857.400		52.742.555		99,78	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9.198.630	12	2.600.000	2.596.500	12	2.590.000	100	99,75	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		21.260.207	12	11.447.900	11.447.900	12	11.430.400	100	99,85	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		16.647.731	12	6.500.000	6.500.000	12	6.499.800	100	100	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		54.058.000	12	20.371.000	22.361.000	12	22.310.500	100	99,77	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		45.012.000	12	10.000.000	9.952.000	12	9.911.855	100	99,60	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.438.298		98.029.100	96.025.680		87.838.122		91,47	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		16.520.000	12	5.000.000	3.000.000	12	2.970.000	100	99,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		78.280.000	12	21.000.000	20.997.600	12	13.621.032	100	64,87	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		226.638.298	12	72.029.100	72.028.080	12	71.247.090	100	98,92	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.348.949		38.311.000	37.073.000		36.607.500		98,74	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		69.478.150	12	21.000.000	26.995.000	12	26.591.500	100	98,51	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8.885.399	12	2.900.000	2.882.000	12	2.850.000	100	98,89	
3	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		60.985.400	12	14.411.000	7.196.000	12	7.166.000	100	99,58	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											100	96,42	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
B	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik						159.349.400	146.288.600		146.282.500		100	
		Persentase kepemilikan KTP EL di Kecamatan	%		100	100			100		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%		100	100			96,21		96,21		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				310.780.431		159.349.400	146.288.600		146.282.500		100	-
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		310.780.431	12	159.349.400	146.288.600	12	146.282.500	100	100	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											100	100	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%			100	23.500.000	23.848.800	100	23.808.800	100	99,83	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				65.041.450		23.500.000	23.848.800		23.808.800			

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasya rakatan		65.041.450	12	23.500.000	23.848.800	12	23.808.800	100	99,83	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											100	99,83	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
D	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%			100	13.200.000	13.200.000	100	13.200.000	100	100	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				49.599.034		13.200.000	13.200.000		13.200.000		100	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		49.599.034	12	13.200.000	13.200.000	12	13.200.000	100	100	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											100	100	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik				85,00			85,44		100		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakanKewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yangBukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokume n										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											0	0	
PREDIKAT											SANGAT RENDAH		
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa												
		Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa /kelurahan	%			1			0		100		

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	17
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%			100			100		100		
1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen						0		0	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											0	0	
PREDIKAT											SANGAT RENDAH		
E	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							41.900.000		39.862.000			
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							41.900.000		39.862.000			
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							41.900.000	12	39.862.000			
					6.371.390.850		2.029.662.946	1.940.704.077		1.903.596.184			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											100	98,09	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM											99,46		
PREDIKAT											TIDAK TERCAPAI		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu
s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	25
KECAMATAN ADMINISTRASI													
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi Keuangan Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (DAU)	%		4.997.211.773	100	1.664.069.709	1.860.355.790	100	333.755.315	100	17,94	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.407.711.773		1.460.469.709	1.656.644.279		304.791.365		18,40	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42/42	4.407.711.773	14	1.460.469.709	1.656.644.279	3	304.791.365	21,43	18,40	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah			153.000.000		51.600.000	51.811.000		731.400		1,41	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	5.900.000	12	2.000.000	1.999.000	3	0	25,00	0	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		33.000.000	12	11.000.000	10.999.000	3	0	25,00	0	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	19.500.000	12	6.500.000	6.500.000	3	0	25,00	0	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	64.600.000	12	22.100.000	22.361.000	3	0	25,00	0	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	64.600.000	12	10.000.000	9.952.000	3	731.400	25,00	7,35	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.000.000		102.000.000	101.999.919		21.528.550		21,11	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	6.000.000	12	5.000.000	5.000.000	3	0	25,00	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	6.000.000	12	22.000.000	21.999.960	3	3.176.385	25,00	14,44	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	25
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	219.000.000	12	75.000.000	74.999.959	3	18.352.165	25,00	24,47	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142.500.000		50.000.000	49.900.592		6.704.000		13,43	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	87.000.000	12	30.000.000	29.984.783	3	6.104.000	25,00	20,36	
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	6.000.000	12	4.000.000	3.998.940	3	0	25,00	0	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	33	5.500.000	12	2.000.000	1.953.869	3	600.000	25,00	30,71	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	44.000.000	12	14.000.000	13.963.000	3	0	25,00	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											24,73	8,90	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
B	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik						127.479.400	127.479.000		0		0	
		Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%			100			100		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%			95			0,31		0,32		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									0			-
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	10	384.078.598	12	127.479.400	127.479.000	3	0	25,00	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											25,00	0	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
C	Program Koordinasi, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	%			100	18.200.000	18.200.000	100	3.300.000	100	18,13	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				54.873.435		18.200.000	18.200.000		3.300.000		18,13	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	25
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	36	54.873.435	12	18.200.000	18.200.000	3	3.300.000	25,00	18,13	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											25,00	18,13	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa						33.848.800	33.848.500		7.673.600		22,67	
		Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%			100			100		100		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%			100			100		100		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%			100			100		100		
1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				86.979.853		33.848.800	33.848.500		7.673.600		22,67	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen			12	5.000.000	5.000.000	3	0	25,00	0	
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	171	86.979.853	12	28.848.800	28.848.500	3	7.673.600	25,00	26,60	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											25,00	13,30	
							1.843.597.909	2.039.883.290		344.728.915			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN											24,93	16,90	
PREDIKAT											SANGAT TINGGI		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM											83,39		
PREDIKAT											TERCAPAI		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.
 - c. Persentase penanganan laporan kejadian.
 - d. Persentase tempat ibadah kondisi baik.
 - e. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa perangkat desa/kelurahan.
 - f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - n. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - o. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - p. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada.
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program Persentase realisasi penerimaan PBB.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi penerimaan PBB Kecamatan Tembarak hanya mencapai 97,58% (Rp. 1.828.098.090) dari ketetapan Rp. 1.873.360.337. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan di beberapa perumahan yang ada di Desa Ngimbrang, Desa Pandemulyo dan Desa Danupayan dialamat SPPT tagihan PBB tidak jelas sehingga warga perumahan enggan membayar. Hal tersebut telah di ajukan ke BPPKAD untuk dilakukan perbaikan data untuk tahun 2024.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **99,83%,**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Capaian Kinerja : 86,88 % kategori Baik
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan
Capaian Kinerja : 99,83 % kategori Baik
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
4. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bulu Triwulan I Tahun 2024
 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		TT	AT	UK
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	86,88	B	B	B	B			100	TT		
2	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100	100	100			100	TT		
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	96,21	95	95	95	0,32			0,32			UK
4	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100			100	TT		
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	100	100	100	100	100			100	TT		
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100			100	TT		
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100	100	100	100			100	TT		

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat menginginkan peningkatan dan kualitas pelayanan yang baik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tidak ada.
 - b. Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM tenaga pelayanan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tidak ada.
 - c. Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesiapsiagaan desa dalam menangani setiap laporan kejadian yang ada
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterlambatan mobilitas dalam penanganan kejadian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tidak ada.
 - d. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan aturan tentang disiplin Perangkat Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tidak ada.

- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APB-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tidak ada.
- f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian RKP-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tidak ada.
- 2. Capaian indikator dengan status tercapai tidak ada .
- 3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat sudah sadar pentingnya membayar kewajina Pajak Bumi dan Bangunan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sebagian besar masyarakat mengandalkan pembayaran PBB masih menunggu hasil panen tembakau
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Tim PBB tingkat kecamatan harus lebih giat melaksanakan monitoring ke desa - desa

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Bulu terdiri dari 7 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin Kepala desa dan perangkat desa, Data Pokok Bidang Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat

waktu, dan Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pennyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.4**Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu Tahun 2020-2024 TW I**

NO.	TAHUN	NILAI
1	2020	82,53
2	2021	84,90
3	2022	86,70
4	2023	86,88
5	2024	86,88

Sumber :Bagian Ortala Kabupaten Temanggung

Berdasarkan nilai diatas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bulu pada tahun 2020 tercapai 82,53 dan untuk tahun 2024 masih menggunakan data Triwulan IV tahun 2023 mendapat nilai 86,88 dengan kategori baik (B). Faktor pendorong yang mendukung tercapainya indikator tersebut dikarenakan masyarakat menginginkan peningkatan dan kualitas pelayanan yang baik. Untuk terus meningkatkan capaian IKM yang semakin baik, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas.

Tabel.2.6
Rata-rata Persepsi per Unsur/Ruang Lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga pada Kecamatan Bulu Kabupaten
Temanggung

NO	UNSUR/RUANG LINGKUP	NILAI	KATEGORI
1	Persyaratan Pelayanan	3.60	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.34	Baik
3	Waktu pelayanan	3.28	Baik
4	Biaya / tariff	4.00	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.38	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.38	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.57	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.40	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.36	Baik
NILAI IKM (NI)		3.40	Baik
KONVERSI NILAI IKM (NI X 25)		86.88	Baik

Berdasarkan tabel diatas nampak terdapat unsur/ruang lingkup pelayanan “Tarif/ biaya, unsur “penanganan pengaduan, saran dan masukan” juga banyak mendapatkan penilaian Sangat Baik dari responden. Sedangkan unsur persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana mendapat penilaian Baik dari responden.

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 sampai dengan 2023 relatif mengalami kenaikan dari 84.90 menjadi 86.88 dengan ketegori nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan

2. Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan

Menurut Peraturan Bupati Nonor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas salah satunya yaitu menyelenggarakan pelayanan publik di kecamatan sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan

Rumus perhitungan presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan Bulu adalah Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah Pemohon Pelayanan di Kecamatan Bulu. Presentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan di Kecamatan Bulu Tahun 2023-2024 s/d Tri Wulan I

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang dilayani	na	na	na	na	68
2	Jumlah Permohonan Pelayanan	na.	na.	na.	na.	68
3	% Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan					100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2024

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase jumlah masyarakat yang dilayani samapi dengan Triwulan I tahun 2024 telah tercapai 100%

Tabel 2.8
Jumlah Pelayanan yang ada di Kecamatan Bulu
Tahun 2024 Tri Wulan I

No.	Jenis Pelayan	Jumlah Pemohon	Jumlah Terlayani
1	Legalisasi Proposal	30	30
2	Legalisasi SKCK	30	30
3	Permohonan KK	8	8
JUMLAH		68	68

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2024

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa setiap warga yang meminta pelayanan selalu terlayani.

3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.9
Jumlah Realisasi Penerimaan PBB
di Kecamatan Bulu Tahun 2020-2024 s/d Tri Wulan I

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	830.166.813	1.000.063.986	1.625.561.243	1.828.098.090	5.267.713
2	Jumlah ketentuan PBB di Kecamatan	830.166.813	1.000.063.986	1.625.561.243	1.873.360.337	2.016.547.248

	Bulu					
3	Persentase (%)	100	100	100	97,58	0,26

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu lunas 100%. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu mencapai 97,58 % atau sebesar Rp. 1.828.098.090. Pada Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I realisasi penerimaan PBB mencapai 0,26 atau sebesar Rp. 5.267.713. Ditahun 2024 batas akhir pembayaran PBB pada tanggal 30 September 2024. Faktor pendorong untuk indikator kinerja ini tim kecamatan bekerja keras untuk menagih ke pumungut PBB dan masyarakat sudah sadar pentingnya membayar kewajinabn Pajak Bumi dan Bangunan sedang untuk faktor yang menghambat di Kecamatan Bulu sebagian besar masyarakat mengandalkan pembayaran PBB masih menunggu hasil panen tembakau.

Tabel 2.10
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di
Kecamatan Bulu Tahun 2024 s.d Triwulan I

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE
1	WONOTIRTO	156.123.237	14.400	0.01
2	PAGERGUNUNG	108.741.699	278.882	0,26
3	WONOSARI	124.102.778	0	0
4	BANSARI	115.732.878	0	0
5	PANDEMULYO	112.858.012	303.534	0.27
6	MALANGSARI	22.266.151	0	0
7	MONDORETNO	312.766.027	0	0
8	PAKUREJO	50.916.205	0	0
9	PENGILON	37.819.042	0	0
10	PASURUHAN	82.076.876	83.209	0.10
11	GONDOSULI	97.548.378	85.867	0.09
12	TEGALREJO	57.772.491	29.335	0,05

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE
13	GANDUREJO	105.725.495	0	0
14	CAMPURSARI	152.316.980	918.943	0.60
15	TEGALLURUNG	39.874.699	1.469.349	3.69
16	BULU	86.511.596	42.996	0.05
17	NGIMBRANG	57.491.270	138.349	0,24
18	PUTAT	31.298.368	528.650	1.69
19	DANUPAYAN	264.605.066	2.322.768	0.88
JUMLAH TOTAL		2.016.547.248	6.216.372	0.32

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pembayaran PBB sampai dengan akhir Triwulan I baru mencapai 0,32%.

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September. Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.11
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2024 s/d Tri Wulan I

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sejumlah 100% . Data 2024 masih menggunakan data tahun 2023. Faktor yang mendorong kinerja untuk indikator ini adalah peran aktif tim fasilitasi RKP-Desa dalam mendampingi tim penyusun RKP-Desa. Adapau upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik terkait indikator ini adalah meningkatkan peran aktif kasi PMD dan pendamping desa dalam memaksimalkan kerja tim penyusun RKP-Desa.

Tabel 2.12
Penyelesaian RKP-Desa

NO	NAMA DESA	NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	Bulu	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
2	Tegallurung	03 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
3	Campursari	03 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
4	Gandurejo	03 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
6	Gondosuli	08 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	04 Tahun	29/09/2023	Tepat Waktu

		2023		
8	Putat	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
9	Danupayan	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
10	Mondoretno	03 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	03 Tahun 2023	25/09/2023	Tepat Waktu
13	Pakurejo	06 Tahun 2023	13/09/2023	Tepat Waktu
14	Malangsari	03 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
15	Pagergunung	03 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
16	Wonosari	05 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
17	Bansari	04 tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
18	Wonotirto	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu
19	Pengilon	04 Tahun 2023	29/09/2023	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2023

Dilihat dari tabel diatas semua desa telah menetapkan RKPDes sudah sesuai dengan Perbup tentang penyusunan RKPDes setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 30 September.

5. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah minindak lanjuti laporan apapun bentuknya. Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2023 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2024 s/d Tri Wulan I

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	2	2	2	2
2	Jumlah laporan kejadian	2	2	2	2	2
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber:Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak tahun 2020 sampai Tahun 2024 cenderung meningkat karena kepadatan penduduk yang meningkat dan kurangnya kepedulian kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.14
Data Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2024 s/d Tri Wulan I

NO	DESA	JUMLAH KEJADIAN	NAMA KEJADIAN
1	Bulu	1	Penemuan Mayat
2	Tegallurung	-	-
3	Campursari	-	-
4	Gandurejo	-	-
5	Tegalrejo	-	-
6	Gondosuli	-	-
7	Ngimbrang	-	-
8	Putat	-	-
9	Danupayan	-	-
10	Mondoretno	-	-
11	Pandemulyo	1	Puting beliung
12	Pasuruhan	-	-
13	Pakurejo	-	-

NO	DESA	JUMLAH KEJADIAN	NAMA KEJADIAN
14	Malangsari	-	-
15	Pagergunung	-	-
16	Wonosari	-	-
17	Bansari	-	-
18	Wonotirto	-	-
19	Pengilon	-	-
Jumlah		2	2

Dari tabel diatas dapat kita lihat sampai dengan Triwulan I hanya ada 2 kejadian yaitu penemuan mayat di Desa Bulu dan terjadi musibah angin puting beliung Desa Pandemulyo. Laporan tersebut langsung di tindaklanjuti melaporkan ke pihak yang berwajib. Faktor yang mendorong kinerja untuk indikator ini adalah kesiapsiagaan desa dalam menangani setiap laporan kejadian yang ada. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja capaian ini adalah meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap ada kejadian di desanya.

6. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.15
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Bulu Tahun 2020-2024 Triwulan I

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	0	0	0	0
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan	227	227	227	227	227
3	Persentase (%)	0,4	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2024 Triwulan I

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu semakin membaik.. Faktor yang mendorong kinerja untuk indikator ini adalah perangkat desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan aturan tentang disiplin Perangkat Desa. Adapun upaya pencapaian terhadap target kinerja yang akan dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi secara terus menerus tentang aturan aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa.

Tabel 2.16
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Bulu Tahun 2024 Triwulan I

NO	DESA	TAHUN 2024	KETERANGAN
1	Bulu	-	Tidak Ada
2	Tegallurung	-	Tidak Ada
3	Campursari	-	Tidak Ada
4	Gandurejo	-	Tidak Ada
5	Tegalrejo	-	Tidak Ada
6	Gondosuli	-	Tidak Ada
7	Ngimbrang	-	Tidak Ada

8	Putat	-	Tidak Ada
9	Danupayan	-	Tidak Ada
10	Mondoretno	-	Tidak Ada
11	Pandemulyo	-	Tidak Ada
12	Pasuruhan	-	Tidak Ada
13	Pakurejo	-	Tidak Ada
14	Malangsari	-	Tidak Ada
15	Pagergunung	-	Tidak Ada
16	Wonosari	-	Tidak Ada
17	Bansari	-	Tidak Ada
18	Wonotirto	-	Tidak Ada
19	Pengilon	-	Tidak Ada

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2023 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu pada tahun 2024 samapai dengan Triwulan I tidak ada perangkat melanggar disiplin.

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Definisi APB-Desa adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada bulan Desember. Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2024 s/d Tri Wulan I

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: PMD Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 cenderung naik dikarenakan sesuai petunjuk yang dari Dinpermades hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Tabel 2.18
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Bulu

NO.	NAMA DESA	NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	Bulu	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
2	Tegallurung	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
3	Campursari	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
4	Gandurejo	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	Nomor 7 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
6	Gondosuli	Nomor 11 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
8	Putat	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu

9	Danupayan	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
10	Mondoretno	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	Nomor 7 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
13	Pakurejo	Nomor 8 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
14	Malangsari	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
15	Pagergunung	Nomor 5 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
16	Wonosari	Nomor 8 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
17	Bansari	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
18	Wonotirto	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu
19	Pengilon	Nomor 6 Tahun 2023	30 Desember 2023	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2023

Dilihat dari tabel diatas desa-desa yang ada di Kecamatan Bulu sudah patuh dan taat dalam menetapkan APBDes sehingga tidak ada yang melampui tanggal batas penetapan yaitu tanggal 31 Desember setiap tahunnya.. Faktor yang mendorong kinerja untuk sasaran ini adalah adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APB-Desa. Adapun upaya pencapaian terhadap target kinerja yang akan dilakukan yaitu asilitasi oleh tim pendamping penyusunan APBDesa secara terus menerus.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bulu dari 7 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu Indikator Persentase realisasi penerimaan PBB. Hal ini disebabkan karena kebiasaan sebagian besar masyarakat Kecamatan Bulu melakukan pembayaran PBB setelah panen tembakau.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu, yaitu sebagian besar masyarakat mengandalkan pembayaran PBB masih menunggu hasil panen tembakau.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.19

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN													DAU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.865.244.279		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu				1.865.244.279	
		Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%				Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%		
		Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%				Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15/1 4	org/bln	1.656.644.279	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	15/1 4	org/bln	1.656.644.279	DAU

										ASN					
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.000.000		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.000.000	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	11.000.000		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	11	Paket	11.000.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.500.000		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.500.000	DAU
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	22.100.000		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	22.100.000	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	laporan	10.000.000		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	10.000.000	DAU
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.000.000		8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.000.000	DAU
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	7.000.000		9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	7.000.000	DAU

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	22.000.000		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	21.999.970	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	75.000.000		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	75.000.000	DAU
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	30.000.000		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	30.000.000	DAU
13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Bulu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	4.000.000		13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Bulu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	4.000.000	DAU
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	2.000.000		14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	2.000.000	DAU
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	14.000.000		15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	14.000.000	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	100	%	127.479.400			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	127.479.400	DAU
			Persentase realisasi penerimaan PBB	95	%						Persentase realisasi penerimaan PBB	95	%		DAU

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	laporan	127.479.400		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	127.479.400	DAU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	100	%	18.200.000			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	100	%	18.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	18.200.000		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Bulu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	18.200.000	DAU
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	100	%	28.686.000			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	100	%	28.686.000	DAU
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	12	Laporan	28.686.000			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bulu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	12	Laporan	28.686.000	DAU
	JUMLAH DAU					2.039.609.679			JUMLAH DAU					2.039.609.679	DAU

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bulu, namun dalam proses ini Kecamatan Bulu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat di Kecamatan Bulu tidak ada

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bulu belum ada

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Bulu belum ada

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bulu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bulu

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka penjabaran dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bulu dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Bulu.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bulu Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	86,88	76,61- 88,30	76,61- 88,30
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95
		Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	%	100	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	%	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	%	100	100

Sumber: Renstra Kecamatan Bulu Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Kecamatan Bulu Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Bulu Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA Kecamatan Bulu TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.656.644.279	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.656.644.279	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.656.644.279		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.656.644.279	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.600.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.600.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.100.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	

e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	4.000.000		Pemeliharaan Mebel	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	127.479.400	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	127.479.400	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	127.479.400	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	127.479.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.479.400		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	127.479.400	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.200.000	3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.200.000	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000	a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.200.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.686.000	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.686.000	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des	28.686.000	a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des	28.686.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	28.686.000,		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	28.686.000,	
	JUMLAH	2.039.609.679		JUMLAH	2.039.609.679	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025 baik dari pagu indikatif Rancangan Renja Tahun 2025 Kecamatan Bulu dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bulu Kab. Temanggung
Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kecamatan Bulu						2.039.609.679,00							2.047.723.679,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.039.609.679,00							2.047.723.679,00	
7	01				KECAMATAN						2.039.609.679,00							2.047.723.679,00	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi keuangan	12 Bulan			12 Bulan	1.865.244.279,00						12 Bulan	1.873.244.279,00	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			14 Bulan	1.656.644.279,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	ASN DILINGKUNGAN KECAMATAN BULU		1.656.644.279,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15/14 Orang/bulan	1.656.644.279,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	ASN DILINGKUNGAN KECAMATAN BULU		1.656.644.279,00	KECAMATAN BULU
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	51.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu		51.600.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu		2.000.000,00	KECAMATAN BULU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu		11.000.000,00	KECAMATAN BULU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	6.500.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu		6.500.000,00	KECAMATAN BULU
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	22.100.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu		22.100.000,00	KECAMATAN BULU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Administrasi Umum Dilingkungan Kecamatan Bulu		10.000.000,00	KECAMATAN BULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				1 Unit	7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu	-	7.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	7.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu		7.000.000,00	KECAMATAN BULU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Bulan	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dikecamatan Bulu	-	107.000.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dikecamatan Bulu		5.000.000,00	KECAMATAN BULU	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dikecamatan Bulu		23.000.000,00	KECAMATAN BULU	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dikecamatan Bulu		79.000.000,00	KECAMATAN BULU	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu		51.000.000,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	30.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu		30.000.000,00	KECAMATAN BULU	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
					Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	4.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu		4.000.000,00	KECAMATAN BULU	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	2.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu	2.000.000,00	KECAMATAN BULU	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	14.000.000,00	Kab. Temanggung, Bulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi	Barang Milik Daerah Dilingkungan Kecamatan Bulu	15.000.000,00	KECAMATAN BULU	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase realisasi	95% 100%		100 % 95 %	127.479.400,00					95% 100%	127.479.400,00		
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-		10 laporan	127.479.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3.reformasi birokrasi melalui	Desa diwilayah Kecamatan Bulu	-	127.479.400,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0			0 0	127.479.400,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3.reformasi birokrasi melalui	Desa diwilayah Kecamatan Bulu		127.479.400,00	KECAMATAN BULU
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana	100 %		100 %	18.200.000,00						100 %	18.200.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		12 Laporan	18.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 3.reformasi birokrasi melalui	Kepolisian Sektor dan koramil Dikecamatan Bulu	-	18.200.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bulu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bulu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bulu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,09 %, realisasi Belanja Modal sebesar 94,85 %, dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 97,44, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 44,99 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, Belanja Barang dan Jasa sebesar 21,76

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bulu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.039.609.679,- yang terdiri dari 4 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik; Program Koordinasi, Ketenteraman,

dan Ketertiban Umum; dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Kecamatan Bulu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 26 Juni 2024


CAMAT BULU
DRS. PANCA PASTIYANTO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661227 199401 1 001